

Dampak jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan: Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah

Zalfa Nabila Putri Balqis*, Bayu Nurhadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: zalfa.nbla.48@gmail.com)

Abstract

Poverty is an individual problem in society, where the poor quality of existing resources, minimum wages that do not meet the cost of living, and population growth continue to increase, affecting competitiveness and making it difficult to meet daily needs. The impact of the decline in the number of poor people is the essential growth factor in the selection of regional development strategies and tools, including efforts to address the decline in the number of poor people in Central Java. This study is quantitative, using annual secondary data from 2018-2023 sourced through the website of the Central Java Provincial Statistics Agency and the annual report of the Central Java Provincial BAZNAS. The analysis method used in this study is moderated regression analysis. The results of this study prove that the population variable has a positive insignificant effect on poverty, the minimum wage variable has a positive insignificant impact on poverty, and the human development index variable has a significant adverse effect on poverty. In contrast, the ZIS variable is unable to moderate the population against poverty, ZIS is unable to moderate the minimum wage against poverty, and ZIS is able to moderate the HDI against poverty.

Keywords: Poverty, ZIS, Population, Human Development Index, Minimum Wage.

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan individual dalam masyarakat, dimana buruknya kualitas sumber daya yang ada, upah minimum yang tidak memenuhi biaya hidup, dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga mempengaruhi daya saing sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak penurunan jumlah penduduk miskin menjadi faktor pertumbuhan terpenting dalam pemilihan strategi dan alat pembangunan daerah, termasuk upaya mengatasi penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder tahunan tahun 2018-2023 yang bersumber melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan laporan tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah moderated regression analysis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel upah minimum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel ZIS tidak sanggup memoderasikan jumlah penduduk terhadap kemiskinan, ZIS tidak sanggup memoderasikan upah minimum terhadap kemiskinan, ZIS sanggup memoderasikan IPM terhadap kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, ZIS, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Indek Pembangunan Manusia.

How to cite: Balqis, Z. N. P., & Nurhadi, B. (2025). Dampak jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan: Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 61–72. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1366>



1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan tantangan bersama di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan utama setiap negara adalah mengentaskan kemiskinan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara-negara berkembang telah menyelidiki dan mengubah perspektif mengenai kemiskinan. Indonesia termasuk di antara negara-negara dengan jumlah penduduk miskin yang signifikan (Hutabarat & Fathorrazi, 2023).

Permasalahan kemiskinan tersebut dapat timbul tindak kejahatan di masyarakat, salah satunya adalah pencurian. Selain itu, peningkatan kemiskinan mungkin akan terus berlanjut dan berdampak pada kesehatan individu ketika mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hidup dalam kemiskinan memastikan bahwa individu memiliki akses terhadap berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk layanan kesehatan, keamanan finansial, inklusi sosial, harga diri, dan masa depan bangsa yang menjanjikan (Saefullah & Anggriawan, 2022). Menurut Sari (2021) mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan merupakan aspek penting yang mempengaruhi pemilihan strategi dan alat pembangunan daerah. Termasuk upaya yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi perhatian karena angka kemiskinannya relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, namun provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya.

Selain besarnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat kemiskinan, upah minimum juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kemiskinan di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Akbar et al. (2022) kebijakan upah minimum juga berdampak pada tingkat kemiskinan. Konsep upah minimum, yang berasal dan berkembang pada awal tahun 1970an, menunjukkan harapan dengan berupaya memastikan bahwa upah minimum dapat menutupi biaya hidup dasar secara memadai dari waktu ke waktu. dengan adanya upah minimum memungkinkan terciptanya kondisi lapangan kerja penuh, dan jika produktivitas tenaga kerja diharapkan meningkat maka pendapatan nasional akan mencapai maksimum (Salsabilla et al., 2022)

Langkah penting menuju kemakmuran suatu negara dan pengentasan kemiskinan adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusianya. Penilaian terhadap kualitas angkatan kerja Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga faktor utama berkontribusi pada penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Aspek penting lainnya adalah pendidikan, diukur dengan perkiraan lama bersekolah, status kesehatan ditunjukkan dengan angka harapan hidup, dan pendapatan bersih per kapita mencerminkan kualitas hidup yang cukup (AC et al., 2023).

Mengingat tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, maka peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tersebut perlu diharapkan, optimalisasi penggunaan ZIS juga akan berperan besar dalam mengurangi kemiskinan di

Indonesia. Menurut Amani (2022) ZIS dapat menjadi modal kerja untuk menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan penghidupannya. Tambahan modal bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk kelancaran usahanya, menambah penghasilan dan menutupi biaya hidup. Tujuan ZIS tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin. Peran ZIS disini sebagai kebaruan dalam permasalahan ini dengan adanya dana ZIS dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil, akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu membuat pendapatan lebih merata sehingga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diambil garis besar bahwa terdapat banyak permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat yaitu dengan menurunkan angka kemiskinan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah diharapkan dapat memperkuat bukti empiris tentang efektivitas pendekatan ekonomi dan sosial yang berbasis ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Perangkap Kemiskinan (Robert Chambers)

Robert Chambers (1983) adalah seorang pakar pembangunan pedesaan asal Inggris yang pertama kali menggunakan konsep kemiskinan terintegrasi untuk memahami masalah kemiskinan di negara-negara berkembang. Menurut Chambers, perangkap kemiskinan terdiri dari 5 dasar, yaitu: Kemiskinan itu sendiri (*poverty*), Kelemahan fisik (*physical weakness*), Keteransingan atau kadar isolasi, Kerentanan (*vulnerability*), dan Ketidakberdayaan (*powerlessness*)

Menurut Chambers (1983) mengingat rancangan perekonomian lebih jauh lagi, sifat selanjutnya dari pembentukan modal dan proses inovasi, Semakin besar laju pertumbuhan populasi dan angkatan kerja, semakin besar pula kecenderungan menurunnya cara hidup kelompok atau kelas tertentu. Namun perlu digarisbawahi bahwa alasan meningkatnya kemiskinan di Asia bukan disebabkan oleh peningkatan populasi. Pesatnya Pertumbuhan penduduk hanyalah salah satu faktor. Penyebab mendasarnya adalah tidak konsistennya tanggung jawab atas sumber daya bermanfaat lainnya.

Kemiskinan

Kemiskinan absolut dan kebutuhan relatif adalah gagasan tentang kemelaratan yang mengacu pada harta benda yang berkaitan dengan cara hidup individu atau keluarga. Kedua istilah ini mengacu pada kontras sosial yang ada di arena publik sehubungan dengan penyebaran gaji. Hal yang penting adalah bahwa dalam kelompok kemiskinan absolut, besarnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh angka-angka asli (garis kemiskinan) serta petunjuk-petunjuk atau ukuran-ukuran yang digunakan, sedangkan dalam kelompok kemiskinan relatif, kelas kemiskinan diselesaikan berdasarkan pemeriksaan keseluruhan tingkat bantuan pemerintah antar penduduk (Hardana, 2022).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduknya yang diimbangi dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan dapat menghasilkan barang (Wibowo, 2023). Jumlah penduduk merupakan isu utama dalam memperbaiki masalah keuangan suatu daerah, karena perkembangan kependudukan tidak dapat dikendalikan, hal ini dapat mengakibatkan tujuan perbaikan keuangan tidak tercapai, misalnya tujuan pengentasan kemiskinan dan bantuan pemerintah (Azizah & Asiyah, 2022).

Upah Minimum

Upah, juga dikenal sebagai imbalan atas tenaga kerja, memiliki dua aspek penting. Bagi pembuat, kompensasi adalah biaya penciptaan yang harus ditekan serendah mungkin. Selain itu, bagi buruh, kompensasi merupakan salah satu bentuk pendapatan bagi mereka dan keluarganya, dan juga merupakan sumber pengeluaran bagi masyarakat. Faktor penting dalam menentukan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan adalah tinggi atau rendahnya upah karena berkaitan dengan pribadi manusia, harga diri, dan status sosial (Kiha et al., 2021).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mencatat pencapaian kemajuan ekonomi suatu wilayah atau negara, yang menggabungkan pencapaian di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan perubahan gaji riil per kapita. Berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP), pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menentukan tingkat rata-rata pembangunan manusia suatu negara (Budiharjo et al., 2020).

Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Sebagai salah satu strategi keuangan dalam Islam, ZIS merupakan salah satu kerangka utama dari aspek keuangan Islam yang dapat dijalankan dengan kemurahan hati dan tidak memberikan dampak di luar standar perekonomian. Wajar jika kerangka aspek keuangan Islam yang dibekali menjadi pilihan berbeda dengan tatanan pasar yang akhirnya menunjukkan persoalan berbeda dalam implementasinya (Arwani & Wahdati, 2020). Menurut penelitian Hilmi et al. (2022) dalam jangka panjang, jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan. Ada beberapa dampak yang membuat penduduk menjadi penghambat pembangunan dan berdampak positif terhadap kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor pembangunan lainnya tidak akan meningkatkan pendapatan dan permintaan.

H1: Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

Dalam penelitian Wafirrotullaela & Bawono (2023) upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan dengan hubungan negatif. Dalam hal penambahan angka kemiskinan, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan asumsi batas gaji minimal yang diperbolehkan undang-undang dinaikkan, maka jumlah keluarga kurang mampu akan

berkurang atau berkurang. Kemiskinan pada umumnya digambarkan sebagai rendahnya upah untuk mencukupi keperluan atau kebutuhan pokok.

H2: Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Dalam penelitian Mahendra (2020) hubungan antara indeks pembangunan manusia dan kapasitas pendapatan produktif sangatlah signifikan. Pendapatan berfungsi sebagai faktor utama dan hasil perkembangan manusia. Mereka yang hidup dalam kemiskinan menyumbangkan tenaga mereka untuk pertumbuhan yang menguntungkan, namun penderitaan mereka disebabkan oleh kurangnya pendidikan, gizi, dan masalah kesehatan yang menghambat kemampuan mereka untuk bekerja. IPM yang rendah mengakibatkan individu berkebutuhan khusus tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang wajar karena keadaan keuangan.

H3: IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Karena Islam sangat menjunjung tinggi kondisi manusia, maka umat Islam harus bisa saling menjaga satu sama lain untuk menjaga diri dari setan dan akhirat. Terlebih lagi, Islam menganjurkan disiplin bagi individu yang mengabaikan berbagai hal yang tidak terbayangkan. Zakat adalah salah satu prinsip Islam yang paling penting. Ini digunakan untuk mengentaskan kemiskinan orang lain dan meningkatkan harga diri sendiri. Zakat firaq, zakat maal, dan zakat profesional yang diwajibkan dapat menambah tercapainya rezeki yang hampir sama dengan ibadah pada kelompok besar orang

H4: Dana ZIS mampu memoderasi hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap kemiskinan

Pengumpulan dana zakat dari karyawan melibatkan penilaian pendapatan mereka berdasarkan prestasi kerja mereka di perusahaan. Artinya, karyawan yang berkinerja lebih baik akan menerima kompensasi yang lebih tinggi yang mencerminkan kontribusinya terhadap keberhasilan perusahaan. Karyawan memperoleh penghasilan dalam bentuk gaji, yaitu uang yang dibayarkan kepada staf manajerial dan administrasi atas kontribusi layanan mereka, biasanya ditentukan berdasarkan tarif bulanan yang ditetapkan (Prayoga & Susilowati, 2018).

H5: Dana ZIS mampu memoderasi hubungan negatif antara upah minimum terhadap kemiskinan

UPZ di Dinas Pendidikan bisa menyalurkan zakat kepada siswa yang kurang mampu. Berbeda dengan UPZ di Dinas Sosial, mereka bisa menyalurkan zakat untuk memecahkan permasalahan sosial. Selama ini penyaluran ZIS tidak hanya berupa bantuan konsumtif kepada para donatur zakat (mustahik), namun juga dukungan modal usaha produktif (Jateng, 2024)

H6: Dana ZIS mampu memoderasi hubungan negatif antara IPM terhadap kemiskinan

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu strategi pengumpulan data yang didalamnya yang memanfaatkan angka yang banyak. Dimulai dari proses pengumpulan data hingga pemahamannya. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dan melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Pada penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran ZIS sebagai moderasi. Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang melibatkan unsur interaksi perkalian dari dua variabel independen atau lebih dalam persamaan regresinya.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \beta_6 X_3 Z + \varepsilon$$

Kemiskinan (Y) merupakan suatu keadaan atau keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini diperlukan sandang, pangan atau tempat tinggal. Jumlah penduduk (X_1) ialah suatu kumpulan yang tinggal dan berkedudukan di suatu negara. Upah minimum (X_2) adalah standar yang ditetapkan oleh pemilik dan manajer bisnis untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada seluruh karyawan di duni kerja. Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, batas minimum ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman untuk membantu masyarakat miskin. Indeks Pembangunan Manusia (X_3) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan harapan hidup, tingkat melek huruf, Pendidikan dan standar hidup IPM memberikan gambaran mengenai tingkat perolehan masyarakat dibidang pendapatan, pendidikan dan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya. Sementara Z merupakan zakat, infak dan sedekah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Uji Asumsi Klasik

	Pendekatan	Nilai
Normalitas	Jarque-Bera	2,166497
	probability	0,297425
Autokorelasi	Durbin-Watson stat	2,268042

Uji normalitas berdasarkan Tabel 1 nilai Jarque-Bera sebesar 2.425184 dengan nilai probability sebesar $0.297425 > 0.05$, maka dapat disimpulkan dari uji normalitas ini ialah data berdistribusi normal. Sementara uji autokorelasi regresi pada nilai Durbin-Watson sebesar 2.268042. Nilai dU yaitu 1.6528 dan 4-dU 2.3472 artinya nilai dw terletak berada diantara dU dan 4-dU yaitu $1.6528 < 2.26042 < 2.3472$. Artinya data terbebs dari autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,048909	6,296241	NA
D(X1)	5,46E-12	1,600871	1,387201
D(X2)	1,23E-12	4,097765	2,433252
D(X3)	1,29E-05	4,824369	1,093637
D(X1Z)	1,82E-32	8,686801	8,329050
D(X2Z)	2,41E-32	8,236498	9,056750
D(X3Z)	1,95E-23	7,880717	6,649725

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF > 10 maka semua variabel dinyatakan lolos atau terbebas dari gejala multikolinearitas. Dengan demikian pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,484512	0,062395	7,765222	0,2130
D(X1)	6,25E-07	7,49E-07	0,834789	0,4050
D(X2)	8,02E-07	4,20E-07	1,911870	0,1576
D(X3)	-0,013889	0,000800	-17,36279	0,2140
D(X1Z)	2,38E-17	3,89E-17	0,610723	0,5422
D(X2Z)	2,26E-17	4,17E-17	0,541612	0,5888
D(X3Z)	-1,03E-12	1,17E-12	-0,882659	0,3787

Pada Tabel 3 bahwa seluruh variabel memiliki nilai probability > 0.05 yang artinya data dalam penelitian ini lolos dari uji heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	0,674776	0,221154	3,051157	0,0027	
D(X1)	3,30E-06	2,34E-06	1,412519	0,1596	tidak signifikan
D(X2)	-4,21E-07	1,11E-06	-0,379426	0,7049	tidak signifikan
D(X3)	-0,017105	0,003591	-4,763714	0,0000	signifikan
D(X1Z)	-7,94E-17	1,35E-16	-0,588250	0,5572	tidak signifikan
D(X2Z)	8,07E-17	1,55E-16	0,519071	0,6044	tidak signifikan
D(X3Z)	-1,35E-12	4,41E-12	-0,306383	0,0497	signifikan

Uji hipotesis pada analisis ini disajikan dalam keterangan berikut:

- Jumlah penduduk (X1), maka dihasilkan koefisien positif sebesar 3,30E-06 dengan nilai probabilitas 0,1596 > 0,05. Maka didapatkan bahwa jumlah penduduk tidak signifikan terhadap kemiskinan.
- Upah minimum (X2), maka dihasilkan koefisien negatif sebesar -4,21E-07 dengan nilai probabilitas 0,7049 > 0,05. Maka didapatkan bahwa upah minimum tidak signifikan terhadap kemiskinan.
- Indeks Pembangunan Manusia (X3), maka dihasilkan koefisien negatif sebesar -0,017105 dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Maka didapatkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

- d. Interaksi jumlah penduduk dengan ZIS menghasilkan koefisien negatif sebesar $7,94E-17$ dengan nilai probabilitas $0,5572 > 0,05$. Maka didapatkan bahwa ZIS tidak memoderasi pengaruh positif jumlah penduduk terhadap kemiskinan.
- e. Interaksi upah minimum dengan ZIS menghasilkan koefisien positif sebesar $8,07E-17$ dengan nilai probabilitas $0,6044 > 0,05$. Maka didapatkan bahwa ZIS tidak memoderasi upah minimum terhadap kemiskinan.
- f. Interaksi IPM dengan ZIS menghasilkan koefisien negatif $1,35E-12$ dengan nilai probabilitas $0,0497 > 0,05$. Maka didapatkan bahwa ZIS memoderasi IPM terhadap kemiskinan.

4.2. Pembahasan

Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Jumlah penduduk didapatkan koefisien positif tidak signifikan yang artinya jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti meningkat atau berkurangnya penduduk tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Kondisi ini terjadi karena faktor indikator penentuan kemiskinan bukan hanya dari jumlah penduduk namun juga disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pertambahan jumlah penduduk di setiap daerah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan di daerah tersebut. Badan Pusat Statistik Indonesia (2013) mendefinisikan penduduk sebagai semua orang yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang telah bertempat tinggal kurang dari 6 bulan namun berniat untuk tinggal di wilayah tersebut (Halim et al., 2022)

Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Upah minimum didapatkan koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan Akbar et al. (2022) bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan tujuan utama untuk memenuhi standar hidup minimum seperti efisiensi dan kesehatan. Semakin meningkat tingkat upah minimum itu sendiri maka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan kemiskinan menurun. Realitanya upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena tidak semua masyarakat mempunyai pendapatan sesuai upah minimum yang telah ditentukan di daerahnya, melihat dari kondisi ini perlu ada evaluasi dari pemerintah dalam mencukupi kebutuhan rakyatnya.

Penetapan upah minimum di seluruh daerah bertujuan untuk mendorong kompensasi yang adil, namun upaya ini masih terhambat oleh kesenjangan antar wilayah, industri, dan jenis usaha, serta gagal mengatasi permasalahan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, dan kondisi pasar tenaga kerja merupakan beberapa faktor yang menentukan upah minimum provinsi. Selain itu, peningkatan produktivitas pekerja juga dinilai menjadi faktor penting dalam penentuan upah minimum (Septian & Asyarurahim, 2023). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Hutabarat et al. (2023) bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Bahwa upah minimum yang dibayarkan adalah upah yang wajar yaitu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

para pekerja dan keluarganya, di dalam ekonomi pasar upah sepenuhnya tergantung pada harga pasar yang ditentukan atas permintaan dan penawaran.

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia memiliki koefisien negatif yang artinya IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian dari Azizah & Asiyah (2022) bahwa variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk mendorong pertumbuhan yang menguntungkan masyarakat miskin menggunakan tenaga mereka, namun kemiskinan juga dapat terjadi karena kurangnya pendidikan mengenai kemiskinan atau gizi buruk dan kesehatan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, masyarakat miskin tidak dapat memanfaatkan pembukaan pendapatan produktif yang timbul dari rendahnya pertumbuhan yang menguntungkan karena indikator pembangunan fana (HDI). Oleh karena itu, penyediaan layanan sosial pendahuluan merupakan bagian penting dalam pengentasan kemiskinan.

Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan IPM terhadap Kemiskinan dengan Moderasi ZIS

Interaksi antara jumlah penduduk dan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) menghasilkan koefisien negatif namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap kemiskinan ketika dimoderasi oleh ZIS. Secara teoritis, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi positif dalam pembangunan, terutama jika diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Semakin besar populasi, potensi jumlah pembayar zakat juga meningkat. Dana zakat yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk modal usaha bagi penerima zakat, sesuai dengan tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan, terutama pada kelompok asnaf seperti fakir dan miskin (Hardana, 2022). Sementara itu, interaksi antara upah minimum dan ZIS menghasilkan koefisien positif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Zakat seharusnya dapat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, membantu golongan kurang mampu melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi. Meski begitu, upah minimum lebih erat kaitannya dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial pemerintah, sehingga peran ZIS dalam konteks ini tidak terlalu dominan (Rifa & Waluyo, 2023).

Berbeda halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), interaksi IPM dan ZIS menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM dan semakin optimal pemanfaatan dana ZIS, maka angka kemiskinan cenderung menurun. Dana ZIS dapat digunakan untuk mendukung pendidikan mustahik melalui beasiswa, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan dan kompetensi masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan (Rifa & Waluyo, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulannya sebagai berikut: Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa

Tengah, maka semakin tinggi jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Upah minimum mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. ZIS tidak memoderasikan pengaruh positif jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. ZIS tidak mampu memoderasikan pengaruh negatif upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. ZIS mampu memoderasikan pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan penulisan jurnal ini. Dukungan dari semua pihak tersebut menjadi kunci keberhasilan penelitian.

Referensi

- AC, A. M., Fadllan, & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 67–88. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v10i1.xxxx>
- Akbar, A., Primandari, N. R., & Muhariah, A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017-2020. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 80–91. <https://doi.org/10.33019/equity.v>
- Amani, M. S. A. M. (2022). Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, 7(3), 152–163.
- Arwani, A., & Wahdati, A. (2020). Effect of Zakat, Infak and Sedekah (Zis), Index Human Development (Hdi) and Unemployment on Indonesian Economic Growth At 2013-2017. *Al-Tijary, August*, 159–173. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2220>
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Budiharjo, A., Arianti, F., & Mas'ud, F. (2020). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 1–9.
- Chambers, R. (1983). Rural development: Putting the last first. In *Routledge*. Routledge.
- Halim, A., Mayesti, I., & Anggraini, R. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 1311.

<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.593>

- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Participation of Zakat Funds in Poverty Alleviation in Indonesia). *Jurnal: Bukhari: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Hilmi, Nasir Hasan Dg. Marumu, M., Ramlawati, & Dewi Peuru, C. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 19–26.
- Hutabarat, T. A. S., Fathorrazi, M., & Nasir, M. A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021. *Journal Ekuilibrium*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.35051>
- Jateng, H. (2024). *Target Penerimaan Zakat ASN Pemprov Jateng Tahun 2024 Capai 100 Miliar.* https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8764#:~:text=Ketua Baznas Jateng%2C KH Ahmad,banyak dimanfaatkan untuk bantuan produktif.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 41–56. <https://doi.org/10.55583/invest.v2i1.128>
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 174–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jmb.v20i2.1010>
- Prayoga, C. J., & Susilowati, D. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Gaji Karyawan Terhadap Pengumpulan Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan DiModerasi Umur Perusahaan. *Soedirman Accounting Review Volume*, 03(03), 100–120.
- Rifa, A. L., & Waluyo, A. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 290–298. <https://doi.org/10.33319/jeko.v12i2.132>
- Saefullah, E., & Anggriawan, M. A. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka Memediasi Dampak Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.66>
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ikra-lth Ekonomika*, 5(2), 96–105.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi ,Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 121–130.

- Septian, A. D., & Asyarurahim. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Jombang Jawa Timur. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 01(1). <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4439>
- Wafirrotullaela, & Bawono, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kab./Kota Di Jawa Tengah Tahun 2021). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1254–1266.
- Wibowo, A. F. N. (2023). Analisis Pengaruh Ekspor, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 215–233. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.370>